

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum Simpeldesa, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dilihat dari aspek akademis dan praktis, serta sistematikan penulisan tugas akhir.

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

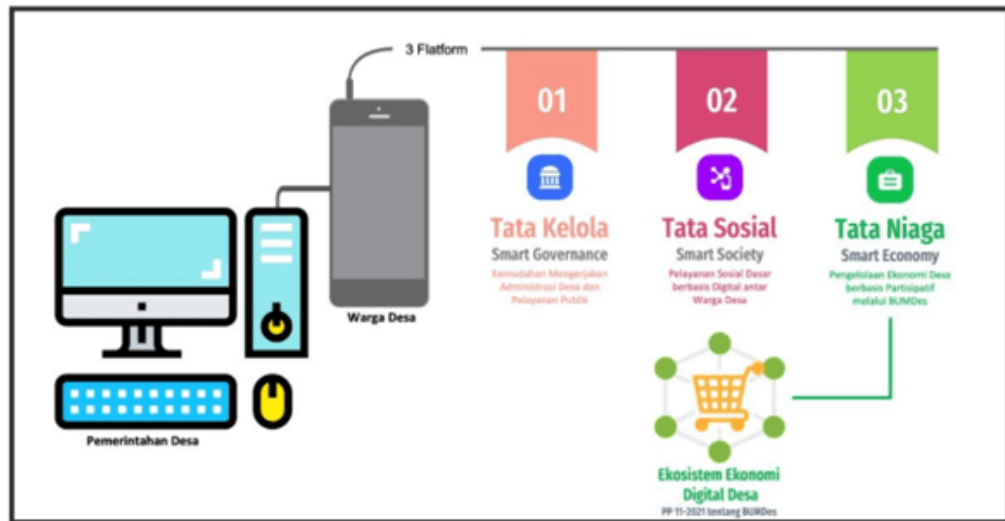
1.1.1 Simpeldesa

Sistem Informasi Managemen Pelayanan Desa (Simpeldesa) merupakan aplikasi berbasis web dan mbile (apps) yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi, hingga kementerian yang terintegrasi dengan masyarakat desa. Konsep besar Simpeldesa terbagi menjadi tiga konsep besar, yaitu digitalisasi Tata Kelola (*Smart Governance*), Tata Sosial (*Smart Society*), dan Tata Niaga (*Smart Economy*) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan ekosistem ekonomi digital di desa.

Ekosistem ekonomi digital merupakan mandat Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di Pemerintahan Desa memiliki ruang untuk mengimplementasikan penggunaan *platform* digital untuk mengembangkan ekosistem desa digital dalam menuju desa mandiri dan maju. Aktivitas ekonomi yang dialihkan dari metode konvensional memberikan ruang bagi desa untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penjelasan mendetail dari digitalisasi desa yang didukung oleh Simpeldesa antara lain ialah:

1. Tata Kelola Desa (*Smart Governance*), yaitu kemudahan pengelolaan administrasi desa, pelayanan publik, dan interaksi pemerintahan desa dengan pemerintahan desa maupun dengan level pemerintahan di atasnya.

2. Tata Sosial Desa (*Smart Society*), yaitu Interaksi sosial berbasis digital antara masyarakat Desa dengan Masyarakat desa lainnya dalam lingkup Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa sesama pengguna simpeldesa. Tata Kelola Sosial Desa ini difasilitasi oleh Pemerintahan Desa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Desa terkait dengan pelayanan dasar yang biasa mereka dapatkan secara manual, seperti Kesehatan, Keamanan, Pendidikan dan Pelayanan Dasar Sosial lainnya. simpeldesa memberikan akses tanpa batas kepada masyarakat Desa untuk peduli dengan masyarakat desa lainnya sebagai dasar masyarakat Desa sebagai makhluk sosial berbasis Digital.
3. Tata Niaga Desa (*Smart Economy*), yaitu Digitalisasi Tata Niaga Desa yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak ekonomi Desa merupakan bagian vital dari platform simpeldesa untuk mengelola semua potensi Desa berbasis transaksi digital. Implementasi Tata Kelola dan Sosial Desa yang maksimal akan memberikan peluang yang sangat besar kepada BUMDes untuk mengedukasi masyarakat Desa mengalihkan semua aktivitas bisnis digital melalui simpeldesa. Masyarakat Desa diharapkan memiliki kepedulian terhadap aktivitas digital berbasis transaksi ini sebagai partisipan utama dalam kemajuan Desa. Partisipasi yang mereka transaksikan tentu harus memiliki kelebihan terhadap kebutuhan aktivitas digital yang biasa mereka lakukan baik dari sisi kualitas, pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) bagi Desanya.

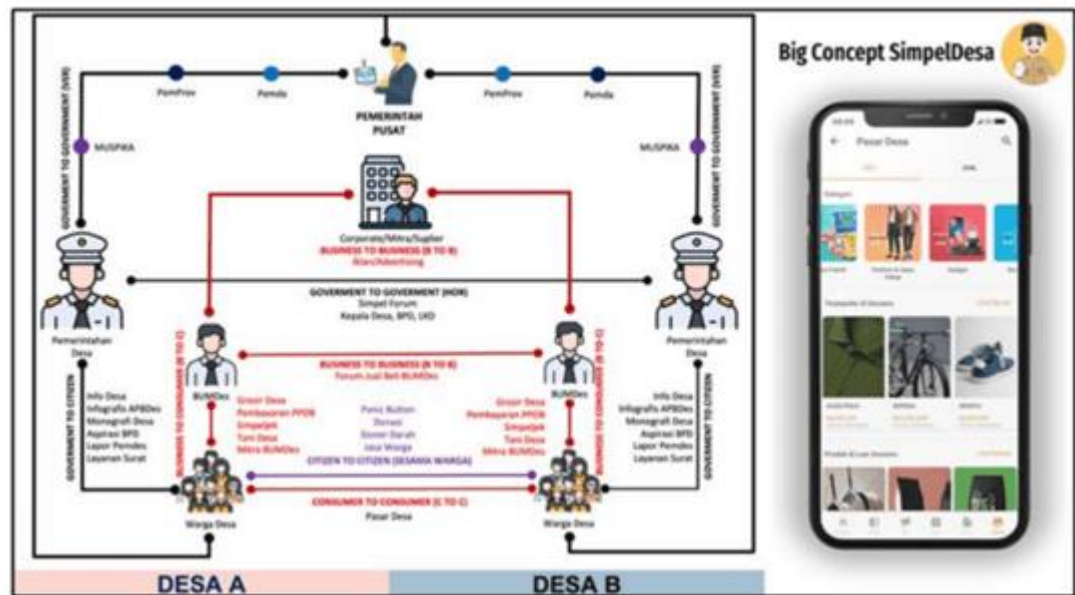


Gambar 1.1

Ekosistem Desa Digital Simpeldesa

Sumber: Ekosistem Simpeldesa (Telkom Indonesia, 2022)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Simpeldesa memfasilitasi transformasi digital desa melalui *smart governance*, *smart society*, dan *smart economy* untuk menunjang pelaksanaan pemerintah dan ekosistem ekonomi digital di desa. Ekosistem ekonomi Digital merupakan amanah dari Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 pasal 4. Pintu masuk pengembangan ekosistem tersebut tercipta melalui kebijakan Pemerintahan Desa. Pengembangan ekosistem desa digital merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah Desa dalam menghadapi persaingan digital dan membangun desa yang mandiri dan maju. Penggunaan Simpeldesa dapat membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui monitasi transaksi yang berlangsung secara digital melalui aplikasi Simpeldesa.



Gambar 1.2

Konsep Digitalisasi Desa melalui SimpelDesa

Sumber: Konsep SimpelDesa (Telkom Indonesia, 2022)

Gambar 1.2 menunjukkan bagaimana SimpelDesa berperan dalam membangun digitalisasi desa antara desa pengguna. SimpelDesa dapat mengembangkan ekosistem ekonomi digital dalam digitalisasi desa. Pemerintah desa dapat menghubungkan warga desa dengan sesama warga desa lainnya yang menggunakan SimpelDesa. Proses monetisasi berlangsung BUMDes mendapatkan *fee* dari setiap transaksi digital yang berlangsung pada aplikasi SimpelDesa. Dengan demikian, semakin besar jumlah transaksi digital melalui SimpelDesa akan berimplikasi secara positif terhadap penambahan jumlah PADes yang dapat dikelola oleh BUMDes.

Implementasi SimpelDesa dapat mendorong proses digitalisasi administrasi, pelayanan, dan ekosistem ekonomi desa. Misi SimpelDesa antara lain ialah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemudahan pengerjaan administrasi Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
2. Menyajikan kenyamanan interaksi administrasi, Informasi dan komunikasi masyarakat desa dalam satu genggaman;
3. Menjadikan BUMDes sebagai pengendali potensi ekonomi desa yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui transaksi digital

Ruang lingkup kemudahan tata kelola desa (*Smart Governance*) daro penggunaan Simpeldesa antara lain ialah sebagai berikut:

1. Government to Citizen

Digitalisasi Tata Kelola Desa yang menghubungkan antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa. Hubungan ini bersifat eksklusif antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa setempat tanpa ada keterkaitan dengan masyarakat Desa lain, sesuai dengan tupoksinya bahwa Pemerintahan Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahnya kepada warganya. Digitalisasi tata Kelola Desa mengalihkan interaksi administrasi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat Desa dari manual menjadi Digital.

2. Government to Government

Digitalisasi komunikasi antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan lainnya

3. Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Desa (Horizontal)

Digitalisasi interaksi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintahan Desa lainnya mencakup hubungan diplomatik peningkatan Kerjasama antara Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Ruang lingkup interaksi ini diantaranya sharing informasi, Inovasi dan Regulasi sampai dengan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Desa lainnya di bidang Ekonomi dan peningkatan Kerjasama lainnya. Interaksi digital ini memberikan hubungan tanpa batas ruang dan waktu sehingga mempererat silaturahmi antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Desa lainnya, sehingga muncul ekosistem aktor Desa dengan

aktor desa lainnya, seperti forum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Forum RT/RW dan forum Lembaga Desa lainnya.

4. Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Desa di atasnya (Vertikal)

Digitalisasi ini memberikan kemudahan interaksi administrasi Pemerintah Desa baik yang meliputi pengajuan, pelaporan, dan fasilitasi antara masyarakat Desa dengan Pemerintahan di atasnya yang perannya tidak bisa dieksekusi oleh Pemerintahan Desa. Digitalisasi ini juga memberikan kemudahan Pemerintahan di atasnya dalam penyampaian informasi, monitoring kegiatan, pengawasan dan kehadirannya langsung di masyarakat Desa. Digitalisasi ini memberikan akses cepat dari setiap Lembaga/Kementerian/Dinas/Instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada pemerintahan Desa maupun langsung kepada masyarakat Desa. Interaksi Digital Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa di atasnya meliputi:

- a. Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kecamatan
- b. Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Daerah
- c. Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Provinsi
- d. Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Pusat

Skema Bisnis di ruang lingkup Tata Niaga Desa (Smart Economy) ini meliputi:

1. Business to Consumer (B2C) Transaksi Digital antara BUMDes sebagai ujung tombak ekonomi di Desa harus mampu melayani kebutuhan barang dan jasa masyarakat Desa. BUMDes dituntut untuk memberikan pelayanan lebih dalam kebutuhan masyarakat tersebut melalui simpeldesa, seperti pemesanan kebutuhan pokok, jasa pembayaran digital, distribusi orang/barang berbasis digital. Selain itu, BUMDes harus mampu berkolaborasi dengan warung-warung kecil dan UMKM dalam peningkatan pendapatan mereka dengan memfasilitasi Kerjasama sebagai Mitra BUMDes agar transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak melalui pihak lain yang tidak menguntungkan Desa.

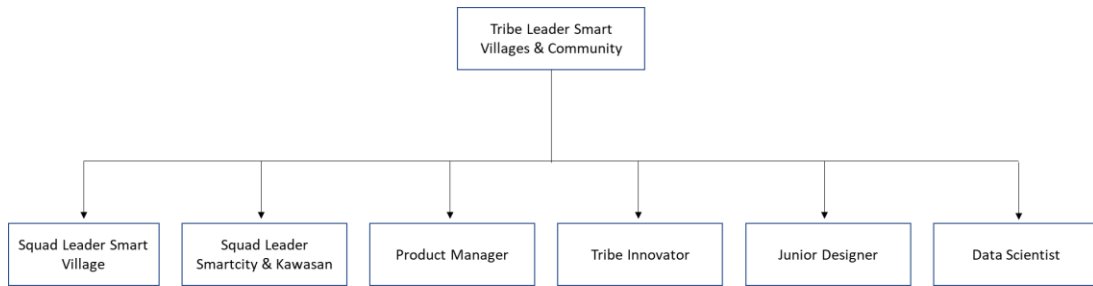
2. *Business to Business* (B2B) Skema bisnis ini memfasilitasi BUMDes berhubungan dengan Mitra Bisnis BUMDes meliputi:
 - a. BUMDes dengan BUMDes Interaksi bisnis antara BUMDes dengan BUMDes lainnya simpeldesa menyajikan komunikasi melalui Forum Jual Beli BUMDes (FJB BUMDes), dimana sesama BUMDes bisa menjual dan membeli barang/jasa sesuai kebutuhan yang diminta oleh masyarakat Desa. Indonesia memiliki beragam potensi berbeda dari masing-masing Desa dan Daerah. BUMDes bisa melakukan transaksi langsung ke BUMDes lainnya dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa.
 - b. BUMDes dengan *Corporate* Kebutuhan barang dan jasa selain dapat diperoleh dari BUMDes lainnya, BUMDes melakukan Kerjasama dengan Corporate melalui simpeldesa. Mitra Corporate simpeldesa akan menyajikan produk-produk yang dimiliki untuk bisa diakses oleh BUMDes, hal ini akan menjadi keuntungan bagi BUMDes karena mendapatkan harga langsung dari distributor/pabrik dan memberikan keuntungan bagi Mitra Corporate simpeldesa dalam menyebarkan akses pasar ke Desa-desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. *Consumer to Consumer* (C2C) Skema bisnis ini menghubungkan bisnis sesama masyarakat Desa pengguna platform yang sama. Masyarakat Desa dapat membuka warung virtualnya untuk berjualan barang dan membeli barang yang dimiliki oleh masyarakat Desa lainnya. Tentu saja skema ini harus memberikan dampak positif terhadap pendapatan BUMDes. Banyak hal yang bisa didapatkan dari skema bisnis ini diantaranya keuntungan per transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa, keuntungan dari Mitra BUMDes dalam hal ini payment dan ekspedisi. Skema ini tidak hanya meliputi transaksi digital berbentuk barang seperti marketplace yang sekarang berkembang tetapi jasa yang dipromosikan oleh sesama warga desa, seperti jasa cukur, cuci motor dll. kelebihanannya adalah apapun aktivitas yang dilakukan oleh warga Desa, BUMDes akan memiliki peran sebagai pengatur ritme transaksi digital dan mendapatkan bagian dalam setiap transaksi tersebut.

Simpeldesa dapat memfasilitasi proses digitalisasi desa dari mulai tata kelola desa (*Smart Governance*), tata social desa (*Smart Society*), dan tata niaga desa (*Smart Economy*). Pemerintah desa akan mendapatkan akses untuk melakukan *monitoring* aktivitas digital dan memberikan pelayanan secara digital. Perangkat desa dan BUMDes akan diberikan akses terhadap *dashboard* tata kelola desa sesuai dengan kewenangannya. *Added value* dari digitalisasi desa jika diimplementasikan dengan baik:

1. Kemudahan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik dapat dirasakan karena sistem administrasi dan pelayanan publik sudah terdigitalisasi dan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan layanan publik.
2. Meningkatkan Konektivitas antar Masyarakat Desa untuk Pelayanan Dasar Sosial karena platform ini sudah mengintegrasikan semua fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan dapat di akses dilakukan dalam genggam tangan. C
3. Pengelolaan Ekosistem Ekonomi Digital sebagai Unit Usaha BUMDes untuk Peningkatan PADes.

1.1.2 Struktur Organisasi

Simpeldesa merupakan sebuah program digitalisasi desa melalui orkestrasi produk dan solusi *smart government*, *smart economy*, dan *smart society* dari Telkom Group. Secara struktur organisasi Telkom Indonesia, Simpeldesa merupakan produk yang dikembangkan oleh Direktorat *Digital Business Technology* (DBT) melalui *Tribe Smart Villages & Community*. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari *tribe* tersebut:



Gambar 1.3

Struktur Organisasi *Smart Villages & Community* Telkom Indonesia

Sumber: Organogram *Smart Villages & Community* (Telkom Indonesia, 2023)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam menopang perekonomian nasional. Disrupsi teknologi menjadi sebuah harapan sekaligus tantangan bagi pembangunan Desa untuk dapat meningkatkan daya saing dan membangun perekonomian digital. Pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk menginternalisasi perkembangan teknologi informasi ke dalam seluruh aspek kehidupan.

Transformasi digital dalam lingkup pamesan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menjadi model pengembangan desa di waktu yang akan datang. Sejalan dengan arahan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT), pembangunan desa diarahkan untuk fokus pada teknologi dan informatika. Beberapa regulasi yang saat ini mendorong implementasi digitalisasi desa antara lain adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes;
3. Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Memabangun;
4. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

5. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pemerintah Desa memiliki peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhan teknologi untuk menambah potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, implementasi teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu proses tata kelola dan tata sosial dalam ekosistem desa. Desa dengan masyarakat yang sudah terbangun literasi digitalnya dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi dalam segala aspek kehidupannya memiliki peluang yang lebih baik dalam membangun daya saing desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi prioritas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) sejak tahun 2021. Salah satu bentuk konkret implementasinya ialah dengan mengembangkan desain desa digital yang meliputi:

1. Digitalisasi penyusunan database desa berbasis big data untuk perencanaan pembangunan desa
2. Digitalisasi pengembangan desa unggulan untuk inventarisir potensi unggulan desa dan kerjasama e-commerce
3. Digitalisasi untuk percepatan layanan Pemerintah Desa
4. Digitalisasi untuk peningkatan transparansi dan pembangunan desa

Implementasi digitalisasi desa dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi desa, pelayanan publik, hingga interaksi antara pemerintah desa dan warga. Digitalisasi desa dapat menunjang proses tata kelola, tata sosial, dan tata niaga desa yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat membangun daya saing desa. Literasi digital pemerintah dan masyarakat desa turut menentukan keberhasilan dari digitalisasi desa. Sistem informasi terintegrasi yang dirancang secara optimal tidak akan memberikan signifikansi jika tingkat penggunaannya rendah.

Digitalisasi desa secara optimal dapat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa jika Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa telah menggunakan *platform digital* tersebut dalam berbagai macam aktivitasnya. Ekosistem digital dapat dibangun jika tingkat keberterimaan *user* terhadap transformasi digital cukup baik. Salah satu indikator yang dapat dilihat antara lain ialah bagaimana *platform digital* penunjang digitalisasi desa digunakan baik oleh Pemerintah Desa ataupun Masyarakat Desa. *Platform digital* yang digunakan dan akan dibahas lebih dalam pada tesis ini ialah Simpeldesa.

Melansir data Telkom Indonesia (2023), Simpeldesa pertama kali diimplementasikan pada Kuartal ke-3 (Q3) tahun 2019 dengan jumlah aktivasi desa sebanyak 44 desa. Jumlah aktivasi desa bertambah sebanyak 143 desa pada Q4 tahun 2019 dan terus bertambah hingga saat ini jumlah aktivasi desa sebanyak 555 desa dari seluruh Indonesia (Telkom Indonesia, 2023). Berdasarkan hasil olahan data Telkom Indonesia (2023), dari total aktivasi desa yang berjumlah 555 desa, desa yang masih aktif menggunakan Simpeldesa sebanyak 340 desa atau sebesar 61% dari total desa yang sudah aktivasi.

Jumlah *active user* Simpeldesa secara nasional ialah sebesar 81.076 pengguna (Telkom Indonesia, 2023). Akumulasi *active user* dengan jumlah paling banyak di lokasi Jawa Barat dengan akumulasi sebesar 16.115 pengguna (Telkom Indonesia, 2023). *Early adopter* di area Jawa Barat yang hingga kini masih menggunakan Simpeldesa adalah Desa Cibiru Wetan dan Pangandaran.

Penggunaan Simpeldesa di Desa Cibiru Wetan dan Pangandaran mampu menghasilkan *output* yang signifikan. Berdasarkan data yang dilansir Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2023), beberapa *success story* implementasi Simpeldesa ialah penggunaan Simpeldesa di Desa Cibiru Wetan antara lain adalah:

1. Peringkat ke-4 Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional dari Komisi Informasi Pusat yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) serta Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2021
2. Desa Percontohan Anti Korupsi KPK dan Kementrian Desa PDPT Tahun Anggaran 2022
3. Penghargaan Desa Mandiri dan IDM Tertinggi Provinsi Jawa Barat tahun 2022
4. Juara 1 Lomba Desa Tingkat Nasional Regional 2, Lomdeskel 2022

Desa Pangandaran merupakan desa percontohan implementasi *Smart Village Nusantara* di Indonesia (Telkom, 2023). Transformasi digital dapat mendukung penggunaan teknologi terapan yang tepat untuk menjadi *piloting* dalam penerapan desa digital guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Total omzet BUMDes pada tarikan data tahun 2022 sebesar Rp. 82.053.702 dengan jumlah transaksi sebanyak 2970 kali transaksi (Pemerintah Desa Pangandaran, 2023).

Fenomena adopsi penggunaan teknologi, yaitu rasio pengunduh aplikasi Simpeldesa yang baru mencapai 2.59% di Desa Cibiru Wetan, 8,55% di Desa Pangandaran, dan data statistik dari penggunaan seluruh fitur Simpeldesa mengindikasikan bahwa saat ini penggunaan aplikasi tersebut masih belum optimal. Penting untuk diketahui faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap intensi untuk menggunakan dan kebiasaan penggunaan Simpeldesa dalam mendorong transformasi digital di desa.

Pengguna Simpeldesa di Desa Cibiru Wetan dan Desa Pangandaran dijadikan *sample* dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan *early adopter* dalam adopsi inovasi digitalisasi desa melalui penggunaan *platform* Simpeldesa. Selain itu, prestasi Desa Cibiru Wetan dengan dukungan penggunaan Simpeldesa mengindikasikan bahwa konsep digitalisasi desa telah diimplementasikan

dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat *opportunity for improvement* dari sisi total pengguna dan penggunaan fitur yang ada pada *platform* Simpeldesa.

Positioning Desa Cibiru Wetan dan Desa Pangandaran sebagai *early adopter* dan prestasi dari implementasi Simpeldesa memberikan penguatan bahwa *sampling* terhadap pengguna di kedua lokasi tersebut relevan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat desa terhadap penggunaan aplikasi Simpeldesa. Rasio pengunduh dan jumlah penggunaan fitur yang ada pada *platform* Simpeldesa di Cibiru Wetan dan Pangandaran mengindikasikan bahwa penerimaan masyarakat desa terhadap digitalisasi desa merupakan hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“penerimaan masyarakat desa terhadap penggunaan aplikasi Simpeldesa”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam transformasi digital desa adalah tingkat penerimaan masyarakat desa dalam menggunakan Simpeldesa sebagai *platform* digital yang mendukung digitalisasi desa. Simpeldesa memiliki potensi untuk mendorong digitalisasi desa dari sisi tata kelola desa (*Smart Government*), tata sosial desa (*Smart Society*), dan tata ekonomi desa (*Smart Economy*). Meskipun demikian, potensi tersebut tidak akan dapat dicapai secara optimal jika *platform* penunjang digitalisasi desa tidak diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat desa.

Implementasi Simpeldesa mendorong terciptanya proses pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dan berkontribusi terhadap pencapaian prestasi Desa Cibiru Wetan. Berdasarkan data yang dilansir Pemerintah Desa Cibiru Wetan (2023), saat ini jumlah pengunduh Simpeldesa di Cibiru Wetan sebesar 307 penduduk dari total penduduk sebesar 11.840 penduduk. Besaran pengunduh Simpeldesa secara rasio baru sebesar 2,59%. Selama 2 tahun masa penggunaan, fitur yang paling sering digunakan ialah layanan surat dengan jumlah surat terlayani sebesar 444 surat. Fitur lainnya,

seperti info desa, lapor desa, dan berita desa belum banyak digunakan. Total info desa yang sudah tayang sebesar 14 info, lapor desa melalui Simpeldesa sebanyak 8 laporan, dan berita desa sebanyak 30 berita (Pemerintah Desa Cibiru Wetan, 2023).

Berdasarkan data yang dilansir Pemerintah Desa Pangandaran (2023), jumlah pengunduh Simpeldesa di Desa Pangandaran sebesar 979 dari total 11.449 penduduk. Rasio pengunduh Simpeldesa terhadap total penduduk sebesar 8,55%. Fitur yang paling sering digunakan ialah fitur surat, dengan penggunaan sebesar 1.188 surat. Total info desa sebesar 123 info, lapor desa melalui Simpeldesa sebesar 8 laporan, dan berita desa sebanyak 103 berita (Pemerintah Desa Pangandaran, 2023).

Data diatas mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penggunaan Simpeldesa di Desa Cibiru Wetan dan Pangandaran. Tingkat penggunaan Simpeldesa yang belum optimal menjadi salah satu parameter bahwa tingkat penerimaan *user* terhadap transformasi digital dalam lingkup perdesaan. Padahal, digitalisasi desa dapat memberikan *added value* dalam pembangunan desa yang berimplikasi terhadap kemudahan proses tata kelola, keterhubungan dan peningkatan aksesibilitas tata sosial desa, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui pengelolaan PADes. Masih terdapat *gap* antara potensi digitalisasi desa dan implementasi transformasi digital desa.

Setidaknya terdapat dua isu utama dari tingkat penerimaan masyarakat desa terhadap penggunaan Simpeldesa. Pertama, berkaitan dengan rasio pengguna aplikasi dibandingkan dengan total warga pada Desa Cibiru Wetan dan Pangandaran. Kedua, berkaitan dengan penggunaan fitur yang ada pada aplikasi Simpeldesa. Kedua fenomena lapangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan masyarakat desa terhadap aplikasi Simpeldesa masih rendah. Sebelum berbicara lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi Simpeldesa, tingkat pengguna ataupun pengunduhnya saja masih rendah, yaitu 2,59% di Desa Cibiru Wetan dan 8,55% di Desa Pangandaran. Tujuan utama digitalisasi desa, diantaranya untuk memberikan kemudahan proses tata Kelola

desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), tidak dapat tercapai dengan optimal jika masyarakat desa tidak memiliki tingkat keberterimaan yang baik terhadap digitalisasi desa.

Tingkat penerimaan masyarakat desa terhadap transformasi digital berkaitan erat dengan teori *digital readiness*. Hal tersebut merujuk pada tahap perkembangan yang menggambarkan potret kecenderungan, keinginan, dan kemauan untuk menginternalisasi perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penentu kesuksesan implementasi transformasi digital.

Dasar teori yang digunakan untuk mengukur penerimaan Masyarakat Desa Cibiru Wetan terhadap transformasi digital ialah model teoritik *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2) Modifikasi*. Model teoritik ini merupakan penyempurnaan dari pendekatan adopsi teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu *Theory and Reasoned Action (TRA)*, *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Motivational Model (MM)*, *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, Kombinasi dari model teori TAM dan TPB, *Model of PC Utilization (MPCU)*, *Innovation Diffusion Theory (IDT)*, *Social Cognitive Theory (SCT)*, *Unified of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*. UTAUT 2 Modifikasi digunakan sebagai model teoritik yang relevan dalam menganalisis adaptasi *platform* digital Simpeldesa yang mendukung implementasi transformasi digital dalam lingkup perdesaan.

Model UTAUT 2 digunakan pada penelitian ini dengan pertimbangan bahwa model tersebut ialah penyempurnaan dari model teoritik sebelumnya dengan jumlah penelitian terdahulu yang memadai sehingga model tersebut valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Terdapat modifikasi pada variabel independen dan variabel moderasi dengan referensi penelitian yang berjudul *The Roles of Intermediaries in Adoption of E-Government Services in Saudi Arabia* (Al Sobhi, 2012). Variabel yang

digunakan pada penelitian ini antara lain adalah *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *hedonic motivation*, *price value*, *habit*, *trust in internet*, *trust of intermediaries*, *facilitating conditions*, *behavioural intention*, dan *adoption behaviour*. Variabel pada Model UTAUT 2 Modifikasi tersebut dikroscek dengan penelitian terdahulu yang ada di Indonesia untuk mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang relevan untuk digunakan dalam mengidentifikasi penerimaan masyarakat desa terhadap Simpeldesa.

Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang mewajibkan seluruh masyarakat desa mengunduh aplikasi Simpeldesa (Pemerintah Desa Cibiru Wetan dan Pangandaran; 2023). Meskipun demikian, secara lisan arahan untuk memenuhi kebutuhan administrasi desa diarahkan untuk satu pintu menggunakan aplikasi Simpeldesa. Hal tersebut berkaitan dengan variabel *social influences* yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, masih terdapat masyarakat desa yang tidak memiliki gawai sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses bahkan mengunduh Simpeldesa. Hal ini berkaitan dengan variabel *facilitating condition* yang termasuk kedalam salah satu variabel yang digunakan pada UTAUT 2. Penelitian ini menganalisis variabel apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan masyarakat desa terhadap aplikasi Simpeldesa. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan mengembangkan strategi dalam mendorong penggunaan Simpeldesa yang mendukung digitalisasi desa.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, penelitian ini membahas beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *habit*, dan *trust* berpengaruh signifikan terhadap *behavioral intention* pada penggunaan Simpeldesa?

2. Apakah *facilitating conditions*, *behavioural intention*, dan *habit* berpengaruh signifikan terhadap *adoption behaviour* pada penggunaan Simpeldesa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada bagian sebelumnya, tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Menganalisis pengaruh *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *habit*, dan *trust* terhadap *behavioral intention* pada penggunaan Simpeldesa.
2. Menganalisis pengaruh *facilitating conditions*, *behavioural intention*, dan *habit* terhadap *adoption behaviour* pada penggunaan Simpeldesa

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada *stakeholder* terkait. Manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi implementasi digitalisasi desa dari sisi proses bisnis dan kesiapan penerimaan masyarakat desa terhadap digitalisasi desa. Secara teoritis, penelitian ini membahas bagaimana digitalisasi desa dapat mendukung proses tata kelola, tata niaga, dan tata sosial desa dari proses bisnis eksisting dan bagaimana masyarakat desa menginternalisasi digitalisasi desa dalam mendukung aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai *knowledge update* terkait dengan desa yang sudah mengimplementasikan digitalisasi desa. Secara spesifik, penelitian ini membahas proses bisnis eksisting dan serta penerimaan masyarakat desa terhadap digitalisasi desa. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan

pandangan untuk pemangku kepentingan terkait mengenai strategi yang relevan untuk diformulasikan untuk mengoptimalkan digitalisasi desa.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pemilihan objek penelitian yang telah dibahas pada bagian selanjutnya, berikut merupakan ruang lingkup objek penelitian:

Lokasi Penelitian : Desa Cibiru Wetan dan Desa Pangandaran sebagai *early adopter* yang sudah memiliki *success story* dari implementasi Simpeldesa

Objek Penelitian : Objek penelitian ini antara lain adalah penggunaan Smart Village Nusantara (SVN)-Simpeldesa di Desa Cibiru Wetan dan Desa Pangandaran

Waktu dan Periode Penelitian : Waktu penelitian adalah 6 bulan termasuk dengan perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penelitian ini selesai dikerjakan

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori pendukung, acuan yang digunakan pada penelitian, variabel-variabel penelitian yang akan digunakan, serta penelitian terdahulu untuk membantu proses pembentukan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Bab ini akan

menjelaskan tinjauan pustaka, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, pengumpulan data, sumber daya, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas hasil penelitian untuk seluruh *point* rumusan masalah. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mulai dari hasil interpretasi data sekunder, proses penyebaran kuisioner kepada responden, hingga pengolahan data.

5. Bab V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang relevan untuk aspek akademis dan praktis